

Analisis Kritis Kurikulum Pendidikan di Indonesia Masa Orde Baru

Aisyah Rahma Astuti¹, Arief Satria², Lu'lu'ul Ulaya³

STAI Nurul Falah, Indragiri Hulu, Riau, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ambarwatidewi1181@gmail.com, ferdyalfikri300720@gmail.com,
nurulkhotimahgunawan343@gmail.com

Article received: 20 November 2024, Review process: 27 November 2024,
Article Accepted: 26 Desember 2024, Article published: 31 Desember 2024

ABSTRACT

The New Order considered curriculum as a strategic tool to create a stable and controlled society. The purpose of this research is to analyze and describe the education curriculum in Indonesia during the New Order era. The approach in this research uses a literature study, where all data is taken through books and scientific journals. The results of this study reveal that during the New Order era, the various educational curricula implemented, ranging from the 1968, 1975, 1984, to 1994 Curricula, reflected the government's goal of creating national stability and shaping the nation's character in accordance with the ideology of Pancasila. The 1968 Curriculum was designed to strengthen Pancasila values and a sense of nationalism, while the 1975 Curriculum was oriented towards an instructional approach that emphasized the achievement of specific educational goals. These developments indicated an adjustment to the curriculum that aimed for education to contribute directly to national development, prioritizing discipline, uniformity and national values. The 1984 curriculum marked a change towards a more active approach through "How to Learn Students Actively" (CBSA), which aimed to encourage student involvement in the teaching and learning process.

Keywords: Curriculum, Education, New Order

ABSTRAK

Orde Baru menganggap kurikulum sebagai alat yang strategis untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan terkontrol. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kurikulum pendidikan di Indonesia masa orde baru. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada masa Orde Baru, berbagai kurikulum pendidikan yang diterapkan, mulai dari Kurikulum 1968, 1975, 1984, hingga 1994, mencerminkan tujuan pemerintah untuk menciptakan stabilitas nasional dan membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Kurikulum 1968 dirancang untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme, sementara Kurikulum 1975 berorientasi pada pendekatan instruksional yang menekankan pencapaian tujuan pendidikan yang spesifik. Perkembangan ini menunjukkan adanya penyesuaian kurikulum yang bertujuan agar pendidikan dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional, dengan mengutamakan disiplin, keseragaman, dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum 1984 menandai perubahan menuju pendekatan yang lebih aktif

melalui "Cara Belajar Siswa Aktif" (CBSA), yang bertujuan mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar-mengajar.

Kata Kunci: *Kurikulum, Pendidikan, Orde Baru*

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Melalui kurikulum, pemerintah dapat membentuk karakter, wawasan, dan keterampilan peserta didik yang nantinya akan menjadi modal dalam pembangunan negara. Di Indonesia, kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi yang berkembang dalam setiap periode kepemimpinan. Salah satu periode yang paling berpengaruh terhadap sistem pendidikan nasional adalah masa Orde Baru (1966–1998), yang berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru menggunakan kurikulum sebagai alat untuk menciptakan "manusia Pancasila" yang loyal kepada negara serta mengedepankan stabilitas dan persatuan nasional (Tilaar, 2002).

Pada masa Orde Baru, kurikulum pendidikan dirancang dengan sangat terpusat dan mengutamakan kepatuhan serta pembentukan nilai-nilai ideologis. Kurikulum 1968, misalnya, diciptakan untuk mengakomodasi visi pemerintahan yang menekankan pada ideologi Pancasila dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan (Rahardjo, 1991). Pada tahun-tahun berikutnya, kurikulum yang diterapkan – seperti Kurikulum 1975, 1984, dan 1994 – terus menekankan pentingnya pengajaran nilai-nilai negara dan nasionalisme, dengan metode yang bersifat instruktif dan didaktis. Sistem pendidikan pada masa ini mengarahkan siswa untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Suryadi, 2019).

Pemerintahan Orde Baru menganggap kurikulum sebagai alat yang strategis untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan terkontrol. Hal ini tampak dalam penerapan metode pendidikan yang sangat terstruktur dan minim fleksibilitas. Kurikulum 1984, misalnya, dikenal dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), namun dalam praktiknya tetap bersifat kaku dan tidak sepenuhnya memberdayakan siswa dalam proses belajar (Slamet, 2003). Pendekatan yang sentralistik ini menciptakan tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan kritis peserta didik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara historis implementasi dan pengaruh kurikulum Orde Baru terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan menganalisis perubahan isi, metode pengajaran, dan dampak dari setiap kurikulum yang diterapkan selama periode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan kurikulum pada masa Orde Baru berkontribusi dalam pembentukan sistem pendidikan nasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi penyusunan kebijakan kurikulum di masa

kini, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis kritis kurikulum pendidikan di Indonesia masa orde baru, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis kritis kurikulum pendidikan di Indonesia masa orde baru, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Kurikulum

Secara bahasa Kurikulum berasal dari bahasa Latin, curriculum yang mempunyai arti bahan pengajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan, atau perangkat mata kuliah bidang khusus (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991). Kurikulum dalam dunia pendidikan mempunyai arti sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapat ijazah atau naik tingkat. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kata kurikulum pertama kali diucapkan di Indonesia pada tahun 1968, yaitu pada saat pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pendidikan menerbitkan kurikulum di tahun 1968. Dunia pendidikan di Negara kita belum menyebutkan istilah kurikulum. Kalaupun ada, maka masih terbatas pada kalangan intelektual saja yang memang mendalami ilmu atau kajian dalam bidang kurikulum. Sebenarnya pengertian kurikulum berbeda dengan berbagai perspektif analisis dari satu pakar dengan pakar yang lain. Hal ini menurut penulis wajar saja. Keberadaan kurikulum selalu tumbuh sepanjang masa mengikuti perubahan zaman dan perbedaan konsepsi bagi setiap ahli pendidikan (Hikmah, Mariatul, 2020).

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa kurikulum adalah rencana yang disusun untuk memfasilitasi proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sukmadinata menekankan bahwa kurikulum mencakup rancangan kegiatan pembelajaran, pengaturan waktu, dan bahan ajar untuk membentuk pengalaman belajar siswa yang sistematis dan terarah dalam

mencapai kompetensi yang diinginkan. Sukmadinata juga menyatakan bahwa kurikulum berperan sebagai panduan bagi pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif (Sukmadinata, N. S. 2009). Sementara, Hasbullah mengemukakan bahwa kurikulum adalah perangkat inti dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk membentuk pola pikir, keterampilan, dan sikap siswa sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Hasbullah menyoroti bahwa kurikulum memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya (Hasbullah, 2006).

2. Orde Baru

Masa Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah berakhirnya Orde Lama pada tahun 1966 dan berlangsung hingga tahun 1998. Menurut Arief Budiman (1999), Orde Baru adalah sebuah era di mana pemerintahan sangat berpusat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Budiman menjelaskan bahwa tujuan utama Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi melalui kontrol ketat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kebudayaan, dan media. Di era ini, pemerintah mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan menekankan pentingnya persatuan nasional sebagai dasar pengelolaan negara demi mencapai kemajuan ekonomi (Budiman, 1999).

Miriam Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa Orde Baru merupakan periode di mana kekuasaan eksekutif memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan proses demokrasi menjadi terbatas. Menurutnya, meskipun Orde Baru membawa perkembangan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, sistem politiknya mengekang kebebasan individu serta meminimalisir partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru memperkenalkan konsep Demokrasi Pancasila yang menekankan pada konsensus, namun sering kali digunakan untuk menekan oposisi dan memperkuat kekuasaan presiden (Budiardjo, 2008)

Thamrin Amal Tomagola (2005) memandang Orde Baru sebagai sebuah rezim yang otoriter dengan fokus utama pada pembentukan stabilitas politik dan keamanan. Menurut Tomagola, pemerintah Orde Baru menguasai alat-alat negara seperti militer, polisi, dan media untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terganggu oleh potensi konflik sosial atau gerakan oposisi. Selain itu, Orde Baru juga melakukan depolitisasi masyarakat dengan mengurangi peran partai politik dan mengalihkan perhatian masyarakat kepada kegiatan ekonomi (Tomagola, 2005). Muhadjir Darwin (2013) menambahkan bahwa Orde Baru memperkenalkan konsep pembangunan nasional yang disebut dengan Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Darwin menjelaskan bahwa konsep ini menjadi panduan utama pemerintah dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Namun, implementasinya lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan, sehingga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Darwin, 2013)

3. Pembahasan

a. Penerapan Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, yang dimulai sejak tahun 1966 hingga 1998, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai dasar utama pembangunan bangsa. Hal ini juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana pemerintah berusaha menciptakan sistem pendidikan yang mendukung pembangunan nasional. Penerapan sistem pendidikan di era Orde Baru banyak dipengaruhi oleh tujuan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap mendukung pembangunan. Meskipun demikian, sistem pendidikan di masa Orde Baru juga memiliki beberapa kelemahan, seperti terbatasnya kebebasan berpendapat serta pengendalian ketat pemerintah terhadap kurikulum.

Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang berfokus pada nasionalisme, keseragaman, dan stabilitas. Kurikulum yang berlaku pada masa ini diarahkan untuk mendukung pembangunan, dengan penekanan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya adalah penerapan Kurikulum 1975, yang menekankan metode pengajaran berpusat pada guru dengan instruksi yang seragam secara nasional. Hal ini bertujuan agar seluruh siswa di Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara dan sesuai dengan arahan pemerintah pusat (Suhartono, A. 2018). Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dijadikan mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan. PMP bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik sejak dini, sebagai upaya untuk membentuk kepribadian nasional yang sejalan dengan ideologi negara. Melalui PMP, pemerintah berusaha menciptakan generasi yang loyal kepada negara dan ideologi Pancasila, serta menjauhi paham-paham yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan (Astuti, R. 2020).

Pada masa Orde Baru, partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat terbatas, terutama dalam kebijakan kurikulum yang ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Selain itu, kebebasan akademik di kalangan pendidik dan mahasiswa dibatasi untuk menghindari konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Banyak pendidik dan akademisi yang tidak dapat menyuarakan kritik terhadap pemerintah karena khawatir dianggap mengancam stabilitas (Suparno, A. 2019). Pemerintah Orde Baru meluncurkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun pada tahun 1984 sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka buta huruf di masyarakat. Implementasi program ini didukung oleh pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan fasilitas belajar lainnya, terutama di daerah-daerah terpencil (Raharjo, B. 2017).

b. Kurikulum Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam kurikulum sebagai upaya mendukung agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah. Dengan tujuan menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, pemerintah Orde Baru menerapkan kurikulum yang berfokus

pada pembentukan karakter dan keterampilan dasar yang diharapkan dapat mencetak generasi yang sesuai dengan visi nasional. Setiap kurikulum pada masa ini memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di setiap periode. Beberapa kurikulum utama yang diterapkan selama masa Orde Baru adalah Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994. Perkembangan Kurikulum pada Masa Orde Baru:

c. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama pada masa Orde Baru yang diterapkan setelah pergantian kepemimpinan dari Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk meneguhkan kembali ideologi Pancasila di dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan fokus pada pembentukan karakter yang selaras dengan nilai-nilai nasionalisme. Mata pelajaran yang ada di kurikulum ini dirancang untuk menciptakan siswa yang religius, nasionalis, dan berjiwa patriotis. Selain itu, kurikulum ini memprioritaskan mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan sejarah nasional (Sujadi, W. 2020)

Penetapan Kurikulum 1968 sebagai kurikulum di Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXVII/MPRS/1966. Jenjang pendidikan yang diutamakan dalam Kurikulum 1968 adalah sekolah dasar. Dalam Kurikulum 1968, mata pelajaran dikelompokkan menjadi tiga kelompok pembinaan. Pertama, kelompok pembinaan pancasila yang meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa daerah dan pendidikan olahraga. Kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar berupa berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Sedangkan kelompok ketiga berkaitan dengan pengembangan kecakapan khusus yaitu kejuruan agraria kejuruan teknik dan kejuruan ketatalaksanaan. Kelompok kejuruan agraria dibagi lagi menjadi kejuruan pertanian, peternakan, dan perikanan. Kejuruan teknik dibagi menjadi kejuruan di bidang pekerjaan tangan dan perbengkelan. Sedangkan kejuruan ketatalaksanaan dibagi menjadi kejuruan bidang koperasi dan tabungan. Kurikulum 1968 memusatkan pembelajaran secara teori dan tidak mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik pada peserta didik. Tujuan pendidikan lebih diarahkan untuk pengembangan pengetahuan (Syaharuddin dan Susanto, H. 2019).

d. Kurikulum 1975

Pada tahun 1975, pemerintah meluncurkan Kurikulum 1975 yang didesain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional melalui pendekatan pendidikan yang lebih praktis. Kurikulum ini berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang spesifik, dengan mengadopsi model pengajaran yang terstruktur. Kurikulum 1975 juga memperkenalkan konsep "satuan pelajaran" dan "rencana pelajaran harian" yang harus diikuti oleh para guru. Kurikulum ini dianggap sebagai pendekatan yang inovatif pada masanya, namun juga memiliki kelemahan karena cenderung berpusat pada guru dan kurang memperhatikan aspek kreativitas siswa (Haryati, 2019). Pemerintah Orde Baru meluncurkan Kurikulum 1975 sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan untuk mendukung pembangunan. Kurikulum ini berfokus pada pendekatan instruksional yang lebih

sistematis dengan penerapan "tujuan instruksional khusus" (TIK) yang diharapkan dapat membantu guru mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Kurikulum 1975 juga memperkenalkan metode pengajaran yang lebih terstruktur, seperti penyusunan rencana pelajaran harian dan penetapan satuan pelajaran yang harus diikuti guru. Namun, kurikulum ini sering dianggap terlalu kaku karena cenderung berpusat pada guru dan menekan aspek kreativitas siswa (Sutanto, 2019).

Kurikulum 1975 sebagai pengganti Kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1) Berorientasi pada tujuan. Pada hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi: tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. 2) Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. 3) Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. 4) Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PSSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur, dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. 5) Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill). Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luas, dalam hal ini sekolah dan guru.

e. Kurikulum 1984 (Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA))

Pada tahun 1984, pemerintah memperkenalkan Kurikulum 1984 yang dikenal dengan metode "Cara Belajar Siswa Aktif" (CBSA). Kurikulum ini berusaha melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar-mengajar, dengan guru bertindak sebagai fasilitator. Pendekatan CBSA dimaksudkan agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Namun, meskipun konsep CBSA dianggap inovatif, banyak guru yang merasa kesulitan dalam menerapkan pendekatan ini karena kurangnya pelatihan dan keterbatasan sarana serta prasarana, khususnya di daerah pedesaan (Hartono, 2021).

Kurikulum 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran Humanistik, yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti lingkungannya. Pada kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Tokoh penting dibalik lahirnya kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta (Universitas Negeri Jakarta). Konsep CBSA yang elok secara teoretis dan bagus hasilnya disekolah-sekolah yang di uji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional.

Kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses, disamping tetap menggunakan orientasi pada tujuan. Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA atau dengan kata lain siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual dan emosional. Ciri-ciri umum kurikulum 1984: 1) Berorientasi pada tujuan instruksional, 2) Pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik; Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 3) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), 4) Materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral, semakin tinggi tingkat kelas semakin banyak materi pelajaran yang di bebaskan pada peserta didik, 5) Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.

Kelebihan kurikulum 1984 adalah; 1) Kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya, 2) Prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat, 3) Keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas, 4) Anak dapat belajar dari pengalaman langsung langsung, 5) Kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun social, 6) Memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif.

Selain memiliki kelebihan, kurikulum ini juga memiliki kekurangan sebagai berikut: 1) Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok, 2) Adanya ketergantungan guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar sangat terbatas, 3) Dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain, 4) Siswa yang pandai akan bertambah pandai sedangkan yang kurang pandai akan ketinggalan, 5) Peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang, 6) Diperlukan waktu yang banyak dalam pembelajaran menyebabkan materi pelajaran tidak dapat tuntas dikuasai siswa.

f. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dengan tujuan memperbaiki kelemahan yang ada, terutama terkait pelaksanaan CBSA. Kurikulum ini menggunakan pendekatan integratif yang mencoba menggabungkan berbagai mata pelajaran menjadi satu kesatuan tema tertentu, terutama di tingkat sekolah dasar. Kurikulum 1994 dirancang agar lebih fleksibel dan memberikan ruang lebih bagi guru untuk berinovasi dalam mengajar. Meski

demikian, kurikulum ini menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya karena guru masih belum sepenuhnya terbiasa dengan pendekatan integratif, dan adanya keterbatasan dalam pelatihan guru (Putra, 2018).

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang.

Kelebihan Kurikulum 1994 adalah; 1) Penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan social, 2) Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, 3) Kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan activate learning (pembelajaran aktif) yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses, 4) Struktur horizontal, termasuk ke dalam seperated subject (terpisah). Hal ini menandakan pada tingkatan SMA materi sudah terpisah, contohnya materi IPA dipecah menjadi fisika, biologi, dan kimia, 5) Pelaksanaan kurikulum di sekolah yang merupakan sistem catur wulan. Sistem catur wulan membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi tiga bagian waktu yang masing - masing disebut catur wulan (1 tahun 3 catur wulan), 6) Kurikulum 1994 termasuk kurikulum yang menganut konsep akademis, karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat perenialisme. Karena pada kurikulum 1994 lebih fokus kepada aspek kognitif siswa.

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut: 1)Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran, 2)Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari, 3) Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran, guru sebagai pusat pembelajaran. Target pembelajaran pada penyampaian materi, 5) Evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian hanya menggunakan teknik paper and pencil test

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini dapat diutarakan pada masa Orde Baru, berbagai kurikulum pendidikan yang diterapkan, mulai dari Kurikulum 1968, 1975, 1984, hingga 1994, mencerminkan tujuan pemerintah untuk menciptakan stabilitas nasional dan membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Kurikulum 1968 dirancang untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme, sementara Kurikulum 1975 berorientasi pada pendekatan instruksional yang menekankan pencapaian tujuan pendidikan yang spesifik. Perkembangan ini menunjukkan adanya penyesuaian kurikulum yang bertujuan agar pendidikan dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional, dengan mengutamakan disiplin, keseragaman, dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum 1984 menandai perubahan menuju pendekatan yang lebih aktif melalui "Cara Belajar Siswa Aktif" (CBSA), yang bertujuan mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar-mengajar. Meskipun konsep ini menawarkan inovasi dalam metode pengajaran, implementasinya menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya pelatihan bagi guru. Kurikulum 1994, yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, berusaha mengatasi kendala CBSA dengan pendekatan integratif yang lebih fleksibel, namun tetap menemui tantangan dalam penerapan di lapangan, khususnya di daerah terpencil. Secara keseluruhan, kurikulum pada masa Orde Baru memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, penekanan pada pendidikan karakter berhasil menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk tenaga kerja industri. Di sisi lain, pendekatan yang seragam dan berpusat pada guru membatasi ruang bagi kreativitas siswa dan kebebasan berpikir. Pelajaran dari kurikulum ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kurikulum yang lebih dinamis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, R. (2020). *Pendidikan Moral Pancasila di Era Orde Baru: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jurnal Pendidikan Karakter. 12(2).
- Budiardjo, M.(2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

-
- Budiman, A.(1999). *Masa Orde Baru dan Dampaknya pada Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darwin, M.(2013). "Trilogi Pembangunan: Sebuah Tinjauan Kritis pada Masa Orde Baru." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Hasbullah. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hartono, S. (2021). *Implementasi Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dalam Kurikulum 1984 di Sekolah Menengah*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Haryati, L. (2019). *Kurikulum 1975 dan Implementasinya dalam Sistem Pendidikan Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*.
- Hikmah, Mariatul. "Makna Kurikulum Dalam Prespektif Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol.15, No.1, (Mei 2020).
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Putra, R. (2018). *Pendekatan Integratif dalam Kurikulum 1994 dan Dampaknya terhadap Pendidikan Dasar di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Rahardjo, M. D. (1991). *Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Raharjo, B. (2017). *Implementasi Program Wajib Belajar di Indonesia: Studi Kasus Orde Baru*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Suhartono, A. (2018). *Kurikulum 1975 dan Pendidikan Berbasis Pembangunan di Masa Orde Baru*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(3).
- Sujadi, W. (2020). *Kurikulum 1968: Landasan Ideologi dalam Sistem Pendidikan Orde Baru*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 15(1).
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Slamet, P. H. (2003). *Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparno, A. (2019). *Pengaruh Kebijakan Orde Baru Terhadap Kebebasan Akademik di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 8(4), 123-133.
- Suryadi, E. (2019). "Pengaruh Kebijakan Kurikulum Orde Baru Terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Sutanto, D. (2019). *Penerapan Kurikulum 1975: Analisis Keberhasilan dan Kelemahan di Lapangan*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
- Syahrudin dan Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Kolonial Nusantara sampai Reformasi*. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tomagola, T. A.(2005). "Orde Baru sebagai Rezim Otoriter: Kajian terhadap Struktur Kekuasaan." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 10(2)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003